

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI

2.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

2.1.1 Profil Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota terbesar yang berada di Indonesia. Kota Bekasi termasuk dalam kawasan megapolitan Jabodetabek (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi), yang jumlah penduduk di Kota Bekasi saat ini sekitar 2,6 juta jiwa.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar $\pm 210 \text{ km}^2$ dan terbagi menjadi 12 kecamatan serta 56 kelurahan. Sebagai daerah penyangga ibu kota, Kota Bekasi mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akibat urbanisasi dan perkembangan kawasan permukiman serta industri. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa, Kota Bekasi termasuk salah satu kota dengan kepadatan penduduk tinggi di Indonesia.

Struktur pemerintahan Kota Bekasi dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dibantu oleh Sekretariat Daerah serta berbagai perangkat daerah seperti dinas, badan dan kecamatan. Perangkat daerah tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pembangunan daerah, serta pengelolaan administrasi pemerintahan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Kota Bekasi memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan utama untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

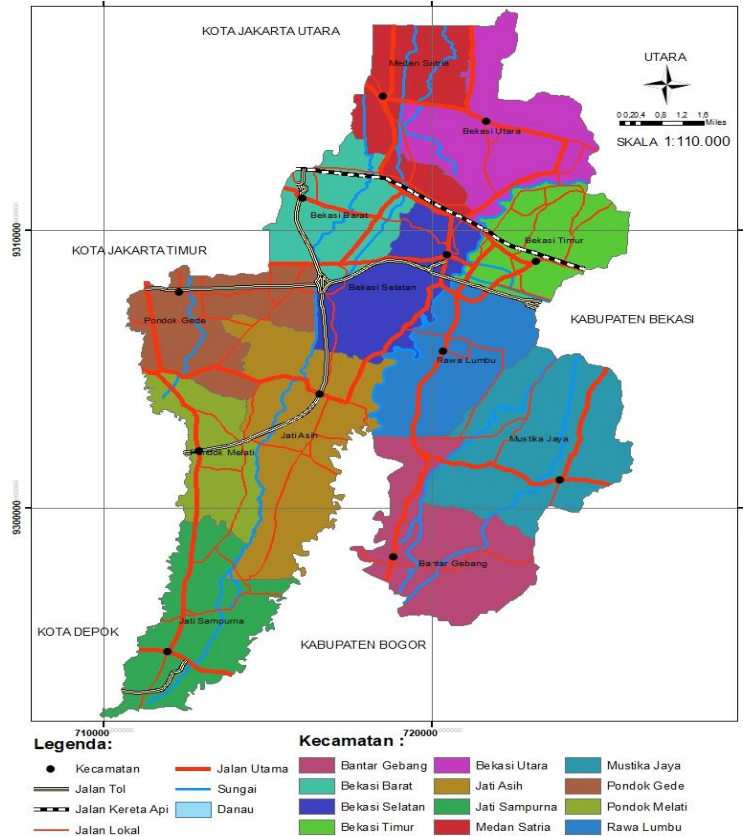
Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan Jangkauan Dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan Yang Semakin Memuaskan Dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan, Baik Jasmani Maupun Rohani, Yang Semakin Kondusif Dan Berkelanjutan;
3. Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Seluas-Luasnya Didukung Dengan Pengembangan Ruang-Ruang Inovasi Dan Kreativitas Generasi Produktif Dalam Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
4. Mengembangkan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Bagi Investasi Pembangunan Dan Dunia Usaha Yang Berkeadilan Rakyat;
5. Mengembangkan Kolaborasi Strategis Dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota Yang Mendorong Kota Bekasi Sebagai Kota Bertaraf Internasional Yang Keren.

2.1.2 Kondisi Geografis

Gambar 2. 1 Peta Kota Bekasi



Sumber; Kota Bekasi dalam angka 2024

Kota Bekasi secara geografis terletak pada $106^{\circ} 48'28''$ – $107^{\circ} 27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 10'6''$ – $6^{\circ} 30'6''$ Lintang Selatan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan batas wilayah Kota Bekasi ialah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok
4. Sebelah Barat berbatasan dengan DKI Jakarta

Kemudian dilihat dari segi administratif, Kota Bekasi dibagi menjadi 12 kecamatan dan 56 kelurahan, yaitu Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantargebang, Mustikajaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medansatria, Bekasi Utara. Luas wilayah Kota Bekasi dibagi pada setiap kecamatan yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Bekasi

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Pondok Gede	17,43
2.	Jatisampurna	20,19
3.	Pondok Melati	11,02
4.	Jatiasih	24,26
5.	Bantargebang	19,24
6.	Mustikajaya	24,76
7.	Bekasi Timur	14,63
8.	Rawalumbu	16,85
9.	Bekasi Selatan	15,81
10.	Bekasi Barat	14,90
11.	Medansatria	13,21
12.	Bekasi Utara	20,80

Sumber; Diolah Peneliti, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

2.1.3 Kondisi Demografi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ini di pengaruhi oleh posisinya sebagai bagian dari Kawasan megapolitan Jabodetabek, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,6 juta jiwa,

menjadikannya salah satu kota dengan populasi terbesar di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk ini disebabkan oleh arus urbanisasi yang signifikan, di mana banyak masyarakat dari berbagai daerah datang ke Bekasi untuk bekerja maupun menetap. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, dan layanan berbasis digital.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Pondok Gede	254,11
2.	Jatisampurna	131,29
3.	Pondok Melati	132,56
4.	Jatiasih	265,30
5.	Bantargebang	111,44
6.	Mustikajaya	233,68
7.	Bekasi Timur	261,48
8.	Rawalumbu	225,79
9.	Bekasi Selatan	214,22
10.	Bekasi Barat	286,11
11.	Medansatria	163,38
12.	Bekasi Utara	347,84
JUMLAH		2.627,21

Sumber; Diolah Peneliti, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Berdasarkan tabel (2.2) menunjukkan jumlah penduduk di 12 kecamatan di Kota Bekasi dengan total keseluruhan mencapai 2.627,21 jiwa. Distribusi penduduk

antar kecamatan terlihat tidak merata, di mana terdapat kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi maupun rendah.

Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Bekasi Utara sebesar 347,84 ribu jiwa, diikuti oleh Bekasi Barat sebesar 286,11 ribu jiwa, dan Jatiasih sebesar 265,30 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk di wilayah ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan Kawasan dengan Tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menarik lebih banyak penduduk untuk bermukim.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Bantargebang sebesar 111,44 ribu jiwa, diikuti oleh Jatisampurna sebesar 131,29 ribu jiwa dan Pondok Melati sebesar 132,56 ribu jiwa. Rendahnya jumlah penduduk di kecamatan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti ketersediaan lahan, Tingkat Pembangunan wilayah, serta akses terhadap fasilitas umum dan pusat ekonomi.

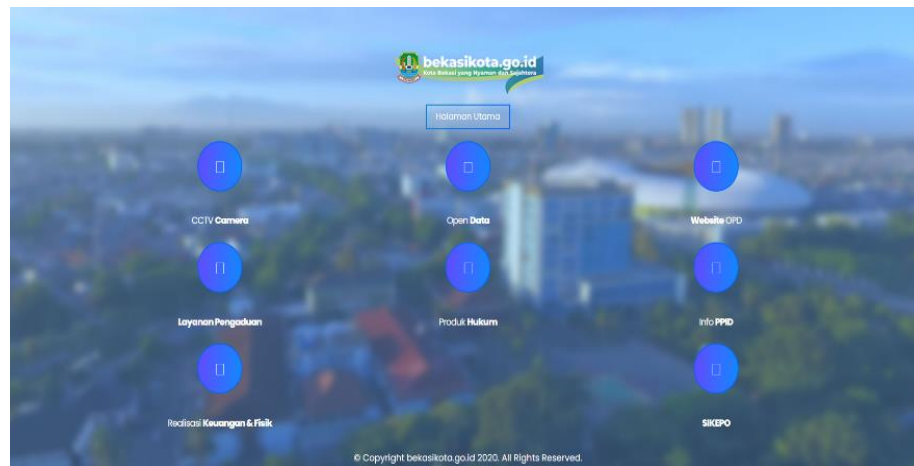
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.320.862 jiwa, sedangkan penduduk Perempuan sebanyak 1.306.525 jiwa. Komposisi ini menghasilkan nilai sex ratio sebesar 101,08, yang berarti dalam setiap 100 penduduk Perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Bekasi sedikit lebih tinggi dibandingkan Perempuan. Dengan demikian, kondisi demografis Kota Bekasi menunjukkan karakteristik wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar, kepadatan relative tinggi, serta komposisi gender yang seimbang.

2.2 Diskominfoandi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfoandi) Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Pembentukan Diskominfoandi Kota Bekasi didasarkan pada peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi dinas tersebut. Sejak dibentuk, Diskominfoandi terus mengalami perkembangan, khususnya dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Peran ini diwujudkan melalui pengelolaan informasi publik, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan digital kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi konsep smart city di Kota Bekasi.

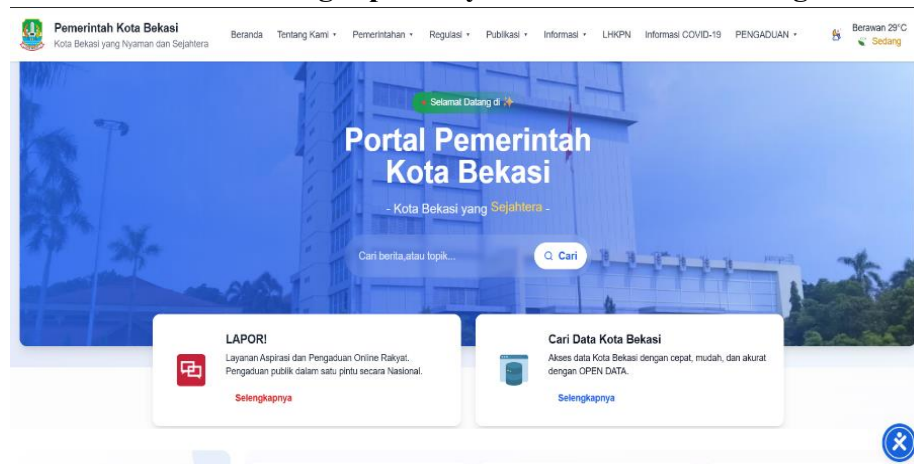
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi mengembangkan website resmi Bekasikota.go.id sebagai media utama dalam penyampaian informasi publik dan pelayanan berbasis digital. Website ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2010 sebagai sarana penyedia informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah, serta sebagai media layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara online.

Gambar 2. 2 Tangkapan Layar Website Bekasikota.go.id



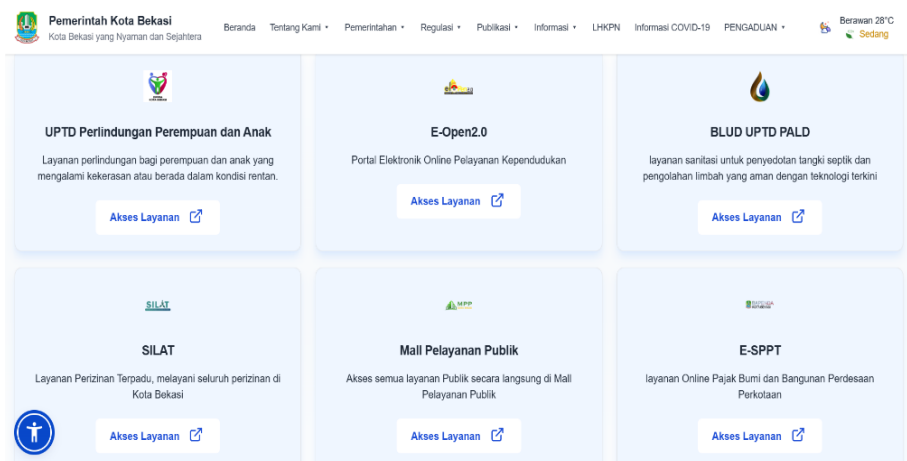
Sumber; Dokumentasi Peneliti 2026

Gambar 2. 3 Tangkapan Layar Website Bekasikota.go.id



Sumber; Dokumentasi Peneliti 2026

Gambar 2. 4 Tangkapan Layar Website Bekasikota.go.id



Sumber; Dokumentasi Peneliti 2026

Seiring dengan pengembangan teknologi informasi, website ini terus mengalami pembaruan dan peningkatan fitur, seperti penyediaan layanan pengaduan masyarakat, akses informasi perangkat daerah, publikasi data dan produk hukum, serta integrasi dengan berbagai layanan digital lainnya.